



Desember 2013

Edisi 12/NL/12/2013

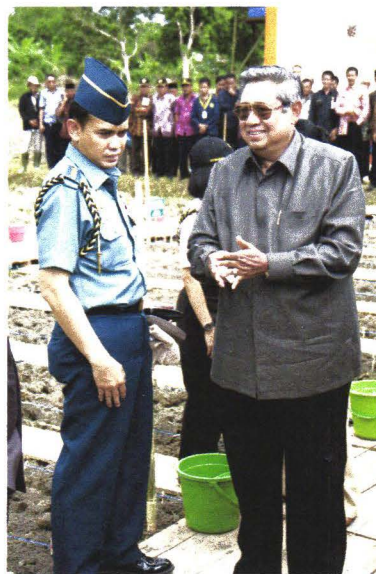
Daftar Isi:

	Hal
1. Presiden RI: "Untuk Hentikan Impor, Tingkatkan Produksi Pangan Nasional".....	1
2. MKRPL Jadi Basis Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Nasional.3	
3. Persetujuan Penerimaan Buah Peer Korsel dan Mangga Gedong Indonesia...4	
4. Madura Akan Menjadi Pemasok Sapi Nasional6	
5. Pertanian Perlu Peran Penyuluh dan Perbankan Serta Dukungan Pemerintah.7	
6. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Sebagai Titik Ungkit Pembangunan Pertanian.....8	
7. Mentan: "Tuntutan Kinerja Harus Berprestasi dan Excellent.....9	
8. Pentingnya Membangun Jejaring Eksternal dan Internal Relations10	

Presiden RI: "Untuk Hentikan Impor Pangan, Tingkatkan Produksi Pangan Nasional"

"Presiden menyatakan sepakat 100 persen untuk mengurangi dan menghentikan impor semua jenis produk pertanian ke dalam negeri, asal petani mampu meningkatkan produksi pertanian dalam negeri. Oleh karena itu, ke depan Pemerintah harus terus meningkatkan produksi dalam negeri dari semua komoditas yang dibutuhkan masyarakat"

Jagung merupakan salah satu dari lima komoditas pangan yang mendapat prioritas untuk bisa berswasembada, untuk itu Pemerintah RI menganjurkan agar para petani meningkatkan hasil produksinya, agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga pemerintah tidak perlu lagi melakukan impor dan otomatis juga akan berdampak terhadap stabilisasi harga, bagi hasil produksi dalam negeri. "Masyarakat perlu meneguhkan tekad mengurangi impor jagung dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri. Dengan mengurangi impor, akan menghemat devisa, pendapatan negara pun bertambah. Dengan meningkatkan produksi jagung di Indonesia, juga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani jagung" kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat dialog dengan petani jagung, di perkebunan jagung hibrida, Desa Montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, (5/12).



Menurut Presiden apabila Pemerintah dapat mengurangi impor, sehingga dapat menghemat devisa dan penerimaan negara juga akan semakin besar, maka akan ada kebijakan pemerintah untuk membantu para petani, guna meningkatkan hasil produksinya, termasuk hasil produksi jagung, garam, kedelai dan sapi dalam negeri. "Kalau produksi jagung dapat tercukupi di dalam negeri, kita tidak perlu impor jagung lagi dan apabila kebutuhan jagungnya juga meningkat maka otomatis harganya baik, kalau harganya baik penghasilan petani akan baik. Untuk itu marilah kita meningkatkan produksi jagung" jelas Presiden.

Presiden menegaskan dengan adanya kebijakan mengurangi impor jagung maka akan memberikan perlindungan bagi produsen dalam negeri. Dengan adanya pembatasan kebijakan impor membuat harga barang yang diimpor menjadi meningkat di pasar dalam negeri. Kondisi tersebut membuat produsen dalam negeri tetap mendapat insentif dalam upaya meningkatkan produksinya. "Bila kita dapat mengurangi impor artinya keuntungan ada dalam negeri kita dan petani kita akan subsidi benih akan terus kita adakan dengan demikian ada insentif. Percayalah, akan ada kebijakan untuk membantu petani meningkatkan produksinya, termasuk jagung" kata Presiden.



Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah akan membuat kebijakan untuk melindungi petani, ketika produksi meningkat dan secara tiba-tiba turun harga. Untuk itu Pemerintah akan terus mengembangkan kebijakan ketika sebuah komoditas produksinya meningkat. Namun, harganya tidak anjlok. "Karena dalam hukum ekonomi, ketika produksinya kurang dan kebutuhan naik, harga akan ikut naik. Namun sebaliknya ketika produksi meningkat sedangkan kebutuhan tidak begitu meningkat maka harga akan turun. Ini yang akan kita jaga sehingga petani tak dirugikan. Tetapi tetap memberikan penghasilan yang layak bagi para petani," ungkap Presiden.

Ketika komoditas dalam negeri lebih, biasanya dijual dan terjadi ekspor. Namun, ketika produksi dalam negeri tidak cukup. Maka harus membeli atau impor. Tetapi Presiden menyatakan sepakat 100 persen untuk mengurangi dan menghentikan impor semua jenis produk pertanian ke dalam negeri, asal petani mampu meningkatkan produksi pertanian dalam negeri. "Beras dan jagung bisa swasembada namun sangat perlu peningkatan produksi di masa depan. Untuk kedele dan daging sapi, masih kurang banyak, maka perlu kita tingkatkan produksinya. Oleh karenanya, ke depan kita harus terus meningkatkan produksi dalam negeri dari semua komoditas yang dibutuhkan masyarakat, termasuk jagung, beras, kedelai dan sejenisnya," imbuh Presiden.

Presiden juga mengungkapkan, pemerintah akan terus membantu para petani untuk meningkatkan hasil produksinya. Tahun 2013 pemerintah menambah anggaran untuk empat kabupaten di Pulau Madura sebesar Rp. 760,7 miliar di luar APBN. Sementara anggaran untuk Madura juga ditingkatkan dari Rp 1,412 triliun tahun 2012 menjadi Rp 1,642 triliun pada tahun 2013. "Peningkatan itu di antaranya untuk membangun infrastruktur, seperti jalan dan irigasi. Irigasi diperbaiki agar dapat mengairi lahan jagung milik petani. Dengan pengairan yang baik diharapkan produksi jagung petani meningkat. Pasalnya selama ini air menjadi persoalan utama petani jagung di Madura" ungkap Presiden.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Pertanian RI Suswono juga mengimbau petani jagung di tanah air tidak perlu khawatir merugi dalam mengembangkan produksi jagung karena selain prospek pasar yang lebih terbuka, juga dari aspek kepastian usaha lebih terjamin dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. "Petani jagung tidak perlu dikhawatirkan karena pasar lebih terbuka, karena khusus untuk Madura dikenal masyarakatnya doyan mengkonsumsi jagung. Masa tanam jagung di Madura juga bisa tiga kali" kata Mentan.

Untuk mendorong agar jagung menjadi bagian konsumsi utama dimasyarakat jika stok beras berkurang, Mentan meminta agar sejak dini anak-anak perlu diperkenalkan untuk mengkonsumsi jagung dan tidak tergantung dengan beras dan untuk meningkatkan produksi jagung, para petani agar mengadopsi benih jagung hibrida. "Jika selama ini petani lokal hanya mampu memanen 3 ton jagung, dengan benih jagung hibrida dapat dihasilkan 6-7 ton jagung. Apabila sektor jagung menjadi perhatian serius maka Indonesia tidak perlu lagi mengimpor pakan dari jagung" ungkap Mentan.

Terkait impor jagung, Mentan mengemukakan, impor jagung bukan untuk konsumsi tetapi untuk kebutuhan industri pakan ternak. Harus diakui Indonesia memang kekurangan jagung untuk industri pakan ternak, yakni jagung jenis hibrida. "Indonesia tengah mengembangkan jagung jenis hibrida. Saat ini sekitar 60 persen dari lahan jagung yang ada sudah ditanami jagung hibrida. Petani Madura perlu dididik untuk menanam jagung hibrida, agar produktivitas panennya bisa ditingkatkan," kata Mentan.

Mentan memaparkan saat sekarang luas panen jagung di Madura mencapai 340 ribu hektare. Dari jumlah tersebut baru 17 persen yang ditanami jagung hibrida. Sehingga masih jauh dari angka nasional yang mencapai 60 persen dan perlu ditingkatkan. Dengan menanam jagung hibrida produksi dapat ditingkatkan menjadi empat sampai lima ton per hektare.

Sementara itu saat ini rata-rata produksi jagung di Madura hanya sekitar satu sampai dua ton per hectare” papar Mentan.

Sementara itu terkait dengan peranan pemerintah daerah, Mentan menilai sangat penting terutama saat harga pangan jatuh. Apabila suatu Pemda yang memiliki anggaran khusus maka jika harga produksi pangan jatuh maka pemda tersebut yang akan membeli hasil produksi petani. “Peran pemerintah daerah sangat penting. Harga produksi pertanian di setiap daerah harus dilindungi pemerintah daerahnya

masing-masing. Menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 mendatang, pemerintah akan terus memberikan pelatihan kepada petani agar secara kuantitas dan kualitas dapat bersaing” imbuh Mentan

Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga mengatakan, provinsi Jawa Timur mengalami surplus hasil komoditas jagung. Hasil panen produksi jagung di Jawa Timur mencapai 6,2 juta ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi sebanyak 3,5 juta ton. Sehingga masih terdapat surplus hasil produksi jagung sekitar 2,7 juta ton.

MKRPL Jadi Basis Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Nasional

“Ketahanan pangan di Indonesia terancam akibat terus menurunnya lahan pertanian. Salah satu jawaban untuk kesejahteraan adalah dengan memperkuat ketahanan pangan berbasis MKRPL, karena model tersebut memanfaatkan pekarangan sempit. M-KRPL merupakan program untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari”

Kebutuhan pangan di Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan meningkat 100 persen dari kebutuhan pangan saat sekarang. Sehingga jika tidak dilakukan langkah-langkah terobosan dikhawatirkan Indonesia mengalami krisis pangan.”Kebutuhan pangan tiap tahun di tanah air terus meningkat tetapi tidak diimbangi penambahan lahan pertanian. Sehingga saat kebutuhan pangan terus meningkat namun lahan pertanian justru semakin berkurang. Untuk itu, para petani harus menyadari hal itu agar tidak beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi perkebunan maupun untuk kegiatan lainnya.” kata Menteri Pertanian, Suswono saat usai meninjau Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) Kota Bandar Lampung di Raja Basa (12/12).



Menurut Mentan ketahanan pangan di Indonesia terancam akibat terus menurunnya lahan pertanian. Untuk itu dibutuhkan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah untuk melestarikan lahan pertanian untuk bercocok tanam serta pemanfaatan lahan terbengkalai. “Masyarakat bisa membantu menjaga ketahanan pangan nasional dengan cara memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam. Dengan begitu diharapkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga dari hasil pengolahan lahan yang ada disekitar rumahnya tersebut” ujar Mentan.

Mentan menjelaskan langkah-langkah sederhana itu terbukti bisa menjaga ketahanan nasional dan meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga. Pasalnya, disekeliling Negara dan daerah di Indonesia yang menerapkan itu terbukti masyarakatnya relatif kondisi perekonomiannya lebih baik. “Sudah saatnya lahan pekarangan dimanfaatkan karena selain sebagai kegiatan yang positif juga untuk memenuhi gizi keluarga sekaligus bisa membantu ketahanan pangan

nasional. Oleh karena itu tanamilah pekarangan kita itu dengan sayuran maupun tanaman yang bermanfaat lainnya,” kata Mentan.

Mentan menerangkan bagi masyarakat yang akan memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk ditanami pangan ataupun untuk beternak sehingga dapat menghemat pengeluaran.maka masyarakat bisa menerapkannya dengan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL). Artinya pekarangan rumah dapat ditanami sayuran, buah atau ternak. Masyarakat yang telah menanam tanaman atau ternak ketika panen dapat membantu kebutuhan masyarakat. Hasil panen yang tidak seberapa besar bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bila berlebih masyarakat dapat menjualnya sebagai pemasukan keluarga. Sehingga dapat dikatakan dari hasil sisa panen dari setiap rumah dapat menghidupi suatu desa. “Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) merupakan program Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara

lestari, dengan indikator nilai PPH masyarakat dan pendapatan keluarga. Jadi salah satu jawaban untuk kesejahteraan, kita memperkuat pangan berbasis keluarga atau MKRPL. Model ini memanfaatkan pekarangan sempit, kalau didayagunakan dengan baik akan bisa mengurangi pengeluaran keluarga. Hasil dari analisa ekonomis bisa mengurangi mencapai Rp150-Rp800 ribu per bulan,” ujar Mentan.

Terkait undangan organisasi pangan dunia mengenai M-KRPL, Mentan memaparkan bahwa konsep Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Indonesia memang telah dimatangkan bahkan Organisasi Pangan Dunia ingin mencontoh Model Kawasan Rumah Pangan Lestari dari negara Indonesia. Untuk itu pada tahun 2013 BPTP Lampung mulai melakukan pendampingan program M-KRPL di Kecamatan Rajabasa terhadap 20 kooperator dan sekarang berkembang menjadi 75 kooperator. “M-KRPL Bandar Lampung di Kecamatan Rajabasa di laksanakan di Kelompok Wanita Tani. Harapan Kita M-KRPL Bandar Lampung di Rajabasa ini sukses menjadi perwakilan dari Provinsi Lampung untuk tingkat Nasional. Sehingga saat mempresentasikan model M-KRPL yang akan dijadwalkan di Hongaria pada Maret 2014, model M-KRPL yang ada di Indonesia bisa dijadikan contoh,” papar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa petani di Indonesia bisa sejahtera dan ketahanan pangannya bisa kuat, jika petani memiliki 2 hektar lahan. Penambahan luas lahan pertanian dapat dilakukan melalui kerjasama semua pihak dan komitmen petani serta penerapan segera undang-undang agraria. “Mengingat saat ini, para petani di tanah air rata-rata hanya memiliki 0,3 hektar maka UU agraria ini harus benar-benar dijalankan. Petani harus dipermudah mendapat akses agar bisa mengelola lahan 2 hektar. Lahan itu tidak harus dimiliki melainkan dikelola oleh petani” kata Mentan.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan juga mengungkapkan, dalam sektor perkebunan, Indonesia

masih unggul dibandingkan dengan negara lain. Untuk hasil sawit dan karet, Indonesia menjadi Negara penghasil terbesar di dunia. Termasuk perusahaan perkebunan nanas asal Lampung menjadi perusahaan terbesar ketiga dunia yang memasok 60 Negara. Untuk itu kepada para investor diharapkan untuk tidak ragu berinvestasi perkebunan hortikultura salah satunya buah-buahan. “Investasi pada buah-buahan sangat prospektif kedepannya. Sehingga investor dapat menepis keraguan untuk membuka perkebunan



buah di Indonesia. Masih banyak investor ragu berinvestasi ke hortikultura, karena memilih ke perkebunan sawit, karet dan kakau. Kalau kebutuhan buahan sangat prospektif maka investasi buah seluruhnya sangat prospek kedepan,” ujar Mentan.

Menurut Mentan pendirian perkebunan buah akan mengurangi impor buah. Meskipun impor buah mencapai 3% tetapi kalau buah impor bisa diproduksi lebih banyak itu akan mengurangi impor buah yang sejenis. “Kita punya potensi dan kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh ternyata bisa yaitu salah satunya melawan buah impor dengan kita membikin perkebunan buah, Oleh karena itu, bagi investor yang sudah berinvestasi pada sawit bisa melanjutkan dengan berinvestasi ke buahan. Jadi masukan utama apa yang dilihat, saya kira bisa dicontoh oleh investor, jangan hanya ke sawit agar tidak jenuh” kata Mentan.

Persetujuan Penerimaan Buah Peer Korsel dan Mangga Gedong Indonesia

“Barantan RI akan menyerahkan CRA (country recognition agreement) langsung ke Korsel untuk menyatakan persetujuan pemasukan buah peer Korsel ke Indonesia. Pada saat menyerahkan CRA itu, Indonesia akan minta agar Korsel juga menerima mangga Gedong Indonesia”

Menteri Pertanian RI bersama Deputi Menteri Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan Korea Selatan, telah menandatangani kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan. Selama ini pihak Indonesia dan Korea Selatan sudah menjalin kerjasama terkait dengan pelatihan petani, dan capacity building SDM bidang pertanian dengan beasiswa S2 dan S3.

“Kerjasama Bilateral ini untuk memperkuat MoU yang sudah ada. Tinggal diimplementasikan pada tingkat operasional. Kerjasama yang sudah berjalan adalah peningkatan capacity building termasuk pengiriman sebagian petani untuk pelatihan dan pendidikan SDM Pertanian jenjang S2 dan S3 ke Korea Selatan, walaupun jumlah petani sekarang mengalami penurunan. Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian



Badan Pusat Statistik terjadi penurunan jumlah rumah tangga di sektor pertanian sebesar 5,04 juta dimana tahun 2012 sebanyak 31,17 juta menjadi 26,13 juta di tahun 2013" kata Menteri Pertanian, Suswono di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 Forum World Trade Organization (WTO) 3-6 Desember 2013, di Nusa Dua Bali, (3/12).

Dengan penurunan jumlah petani, Mentan mengaku tidak terlalu kaget dan justru menilai hal tersebut sangat positif, sebab, di negara-negara maju jumlah petaninya justru hanya sekitar 5%-an, maksimal 10%. Di Indonesia jumlah angkatan kerja di sektor pertanian masih sebesar 40%. "Jika melihat data BPS kemungkinan jumlah rumah tangga petani turun dari 31 juta menjadi 26 juta. Berarti, penurunan jumlah petani sebesar 5 juta. Kondisi ini justru berdampak positif sebab, jika jumlah petani bertambah tapi luas lahan semakin berkurang justru akan menambah kemiskinan, apalagi petani-petani kita tipologinya, termasuk petani gurem" kata Mentan.

Mentan menegaskan, banyak faktor yang menyebabkan petani mengkonversi tanah pertanian untuk non-pertanian. Saat terjadi fragmentasi lahan, orang menjadi tidak efisien lagi bertani. Sehingga lahan pertanian yang ada diubah menjadi rumah kemudian dijual. "Turunnya jumlah petani, juga bisa jadi karena turunnya jumlah luas lahan. Sebab, petani banyak yang menjual lahan. Setelah lahan dijual kemungkinan petani beralih menjadi buruh. Selama belum ada ekspansi (tambahan) lahan yang masif dan tambahan akses lahan bagi petani, bertambahnya jumlah petani justru akan menambah kemiskinan para petani. Sebab, penguasaan lahan semakin sempit" ucap Mentan.

Menurut Mentan dalam kesepakatan kerjasama tersebut, pihak Korea Selatan juga meminta agar produk buah peer dari Korsel bisa masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Tentunya setelah melakukan uji kesehatan dan penelaahan. "Untuk sementara kuota tidak dibatasi, tergantung kebutuhan pasar. Apalagi buah peer tidak diproduksi di Indonesia jadi kapan saja bisa masuk. Sekarang sudah masuk melalui Tanjung Perak. Tetapi tetap dikontrol secara ketat. kalau SOP-nya sudah

memenuhi syarat dan diakui, bisa dimulai. Awal 2014, mudah-mudahan sudah dimulai. Pelaku usaha juga sudah siap," tutur Mentan.

Mentan menjelaskan pada 9 Desember 2013 mendatang, Badan Karantina Kementerian Pertanian RI akan menyerahkan CRA (*country recognition agreement*) langsung ke Korsel, yang menyatakan persetujuan pemasukan buah peer Korsel ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok. "Dengan adanya penyerahan CRA dari Karantina. Artinya buah peer dari Korsel sudah aman masuk Indonesia melalui Tanjung Priok dan pada saat menyerahkan CRA itu, kami akan minta agar mereka juga menerima mangga Gedong Gincu kita" ucap Mentan.

Mentan menuturkan selama ini produk mangga Indonesia belum bisa masuk ke pasar Korsel dengan alasan belum bebas lalat buah. Namun dengan pola penanganan saat ini, yakni dengan mesterilkan produk buah dengan menggunakan air panas, produk mangga ini diharapkan bisa diterima Korsel. Untuk itu, Indonesia meminta Korsel membuka pasarnya untuk produk mangga Gedong Gincu Indonesia. "Permintaan terhadap mangga Gedong Gincu Indonesia cukup besar di Korsel. Ritel terbesar di Korsel sudah meminta agar dikirim secara rutin mangga jenis ini. Namun karena otoritas di Korsel belum mengizinkan permintaan tersebut belum dapat dipenuhi. Di negara subtropis seperti Korea Selatan, mangga tidak tumbuh dengan baik. Karena itu mangga sebagai buah tropis sangat spesial bagi orang Korea" tutur Mentan.

Pemerintah Indonesia berharap mangga Gedong Gincu bisa merambah pasar Korea Selatan. Hal tersebut untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama di bidang pertanian antara kedua negara yang telah ditandatangani November 2011 lalu. "Setelah mereka menikmati buah Indonesia, saya yakin pasar akan berkembang. Dari sisi konsumen Lotte Mart Korea Selatan sudah memintanya dan dari sisi produksi mangga, daerah Cirebon dan sekitarnya sudah cukup potensial dan saat ini relatif cukup untuk memenuhi pasar ekspor. Mangga gedong merupakan produk perdana kerjasama dengan Korea Selatan," imbuh Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan Indonesia dan Korea Selatan juga sepakat untuk menghilangkan hambatan-hambatan non tarif untuk komoditas pertanian serta perkebunan dan pihak Indonesia menginginkan negara-negara maju menghapus subsidi pangan untuk ekspor. "Yang krusial bagi Indonesia adalah mendorong penghapusan subsidi ekspor dari negara-negara maju. Terutama, subsidi ekspor pangan. Subsidi itu kan 'dumping' dalam tanda kutip sebenarnya yang dilakukan oleh negara-negara maju," kata Mentan.

Mentan menegaskan bahwa masalah mendesak bagi Indonesia adalah menyangkut subsidi ekspor yang

dilakukan oleh negara-negara maju. Sebab, subsidi itulah yang membuat petani mereka sangat kompetitif. Apalagi mereka sudah melakukannya dalam skala yang luas dan ditambah dengan subsidi. "Pemberian subsidi ekspor tentu sangat memberatkan sehingga

negara berkembang tentu tidak bisa berkompetisi dengan negara maju, Masalah ini yang terus kita perjuangkan supaya ada kompetisi yang sehat dan kita meminta supaya subsidi itu dihapus," tandas Mentan.

Madura Akan Menjadi Pemasok Sapi Nasional

"Produksi sapi di Madura paling tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia yang mana populasinya mencapai 803.000 ekor. Jumlah itu bahkan menyamai jumlah yang ada di NTB dan NTT yang selama ini dikenal sebagai sentra peternakan sapi di Indonesia. Mentan beryakinan populasi sapi di Madura akan menjadi pemasok kebutuhan sapi nasional bahkan dapat diekspor"

Berdasarkan hasil sementara sensus pertanian 2013 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) populasi sapi dan kerbau di Jawa Timur menunjukkan penurunan dibanding tahun 2011. Dalam kurun waktu dua tahun tersebut penurunan populasi sapi di Jawa Timur mencapai 1,2 juta ekor. Secara nasional atau dibandingkan provinsi lain, berkurangnya populasi sapi di Jawa Timur adalah yang terbesar. Untuk itu Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi sapi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pasokan daging dengan memaksimalkan potensi sentra pengembangan sapi lokal.



"Pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan mendorong kawasan Madura di Jawa Timur sebagai salah satu kawasan pengembangan peternakan sapi di Tanah Air. Kementerian Pertanian menilai Pulau Madura Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang besar sebagai salah kawasan pengembangan peternakan sapi di Indonesia karena produksi sapi di Madura paling tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia yang mana populasinya mencapai 803.000 ekor" kata Menteri Pertanian, Suswono saat melakukan kunjungan kerja ke Madura, Jawa Timur (5/12).

Menurut Mentan, Produksi sapi di Madura paling tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia yang mana populasinya mencapai 803.000 ekor. Jumlah itu bahkan menyamai jumlah yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang selama ini dikenal sebagai sentra peternakan sapi di Indonesia.

"Potensi ternak yang dimiliki daerah tersebut menarik pemerintah untuk mendorong Madura sebagai Pulau Sapi dan saya beryakinan populasi sapi di Madura akan menjadi pemasok kebutuhan sapi nasional bahkan untuk diekspor, karena potensi bobotnya mampu mencapai 700 kg per ekor' ujar Mentan.

Mentan memaparkan Madura banyak memiliki pulau sangat mendukung sebagai pengembangan produksi sapi lokal. Apalagi sapi Madura hasil persilangan

dengan sapi Limosin dari Australia atau yang biasa disebut sapi Madrasin, kualitasnya akan lebih bagus dan bisa bersaing dengan sapi impor,

"Salah satu pulau di Madura ada yang memiliki populasi sapi melebihi jumlah penduduknya yaitu Pulau Sapudi Jumlah ternak sapi di pulau tersebut mencapai 50.000 ekor sementara warganya hanya 40.000 jiwa. Oleh karena itu, jika ada potensi daerah di pulau Madura, pihaknya akan meningkatkan pengembangan wilayah tersebut sebagai pusat peternakan sapi" kata Mentan.

Mentan mengakui, saat sekarang dari kebutuhan ternak sapi sebanyak 549.000 ekor sebanyak 80 persen masih harus didatangkan dari luar terutama dari Australia. Salah satu kendala memenuhi pasokan ternak sapi di pasaran, adalah budaya masyarakat Indonesia yang belum mengarah pada agribisnis. Sehingga pola pengembangan sapi masih tradisional, bukan dikelola secara bisnis dengan target yang jelas.

"Mereka hanya menjual sapinya saat membutuhkan uang. Meskipun harganya tinggi tidak akan dijual jika tidak membutuhkan uang. Sebaliknya saat butuh uang meskipun harga di pasaran rendah akan dilepasnya. Pola seperti ini harus diubah secara bertahap sehingga Madura bisa menjadi sentra produksi sapi nasional yang bisa diandalkan," kata Mentan.



untuk memotong sapi sendiri untuk konsumsi ketimbang membeli daging sapi ke pedagang. Penurunan jumlah populasi sapi dan kerbau ini juga terjadi secara nasional. "Dibandingkan tahun 2011, populasi sapi dan kerbau di Indonesia pada tahun ini berkurang 2,56 juta ekor, yakni dari 16,73 juta ekor pada 2011 menjadi 14,17 juta ekor. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 2 tahun tersebut populasi sapi nasional berkurang 15,3 persen. Penurunan terbesar terjadi di Jawa Timur. Sedangkan penurunan terkecil ada di Kalimantan Tengah," ujar Kepala BPS Jatim.

Menanggapi penurunan populasi ternak sapi di Jawa Timur, Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, M Sairi Hasbullah mengatakan bahwa dari hasil pencacahan sensus pertanian 2013, populasi sapi dan kerbau di Jawa Timur pada 1 Mei 2013 adalah sebanyak 3,83 juta ekor. Angka ini menurun sekitar 1,2 juta ekor dibandingkan jumlah yang tercatat pada 1 Juni 2011. "Terdapat beberapa faktor yang mendorong pengurangan populasi sapi di Jawa Timur. Pertama, faktor perdagangan di mana Jawa Timur sebagai pemasok sapi terbesar di Indonesia. Karena Jawa Timur pemasok sapi terbesar, artinya daerah lain harus mengambil sapi dari Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ini menyebabkan populasi sapi di Jawa Timur terus berkurang. Faktor harga juga dianggap menjadi penyebab berkurangnya populasi sapi di Jawa Timur," jelas Kepala BPS Jatim.

Kepala BPS Jatim menuturkan, akibat harga sapi terus melonjak, masyarakat terutama pemilik sapi, memilih

Menurut Kepala BPS Jatim, pihaknya telah merilis Hasil Sensus Pertanian 2013. Sensus tersebut menyebutkan populasi sapi dan kerbau di Jawa Timur menurun hingga 1,23 juta ekor. Sensus Pertanian 2013 tersebut merupakan sensus pertanian keenam yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali sejak 1963. Pelaksanaannya dilakukan dengan metode pencacahan lengkap usaha pertanian pada Mei 2013.

"Dari hasil pencacahan lengkap, diketahui ada tiga kabupaten yang mempunyai sapi dan kerbau paling banyak. Ketiga daerah itu adalah Kabupaten Sumenep dengan 333,77 ribu ekor, Kabupaten Tuban 253,13 ribu ekor dan Kabupaten Malang 240,12 ribu ekor. Sedangkan jumlah sapi dan kerbau paling sedikit di Kota Mojokerto dengan hanya 144 ekor. Penurunan absolut sapi dan kerbau terbesar dari 2011 ke 2013 terjadi di Kabupaten Jember yaitu turun 121,48 ribu ekor dan penurunan terendah di Kota Madiun sebanyak 104 ekor" ujar Kepala BPS Jatim.

Pertanian Perlu Peran Penyuluh dan Perbankan Serta Dukungan Pemerintah

"Tanpa penyuluh, petani akan susah menggunakan teknologi pertanian, padahal teknologi bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan hasil penelitian untuk pertanian. Dunia pertanianpun membutuhkan kredit untuk mengembangkan pertanian, perbankan yang tumbuh besar dari pedesaan agar menaburkan kredit ke sektor pertanian. Begitu pula dukungan pemerintah terhadap petani dalam bentuk subsidi pupuk"

Peran penyuluh ke depan akan menjadi semakin diperlukan dengan situasi ke depan yaitu persoalan pangan. Kebutuhan pangan pada tahun-tahun mendatang akan meningkat. Pasalnya pertumbuhan penduduk selalu bertambah. "Kebutuhan pangan akan meningkat karena diperkirakan pada 2014 jumlah penduduk dunia akan mencapai 9 miliar orang. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia, otomatis pangan menjadi komoditas penting yang dikonsumsi" kata Menteri Pertanian Suswono saat melakukan kunjungan kerja ke Malang-Jawa Timur (1/12).

Menurut Mentan kebutuhan pangan akan semakin menentukan kondisi wilayah geopolitik dunia karena persoalan pangan akan meningkat dua kali lipat.

Sehingga apakah pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim. "Solusi menghadapi semua tantangan tersebut yaitu adanya teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan hasil penelitian untuk pertanian, sehingga peran penyuluh pada tingkat petani sangat menentukan. Sebab tanpa penyuluh, petani akan susah menggunakan teknologi pertanian." kata Mentan.

Mentan menjelaskan selain peran penyuluh maka peran perbankan sangat diperlukan. Perbankan yang selama ini menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dari petani, agar menyalurkan kredit ke petani. Sayangnya perbankan ketika mengucurkan



kredit malah di perkotaan. "Oleh karena itu, perbankan yang tumbuh besar dari pedesaan agar kembali berkonsentrasi menaburkan kredit ke sektor pertanian di pedesaan. Bank yang mengutip Dana Pihak Ketiga (DPK) agar tidak melupakan jasa pedesaan. Pengucuran kredit sudah selayaknya lebih banyak untuk membangun pertanian." ucap Mentan.

Mentan memaparkan dunia pertanian membutuhkan kredit untuk mengembangkan pertanian, misalkan untuk ekspor sawit. Kalau itu dapat dikelola dengan benar itu pasti menguntungkan banyak petani dan akan sukses. Saat sekarang sektor pertanian yang kelihatan meningkat yaitu ekspor sektor perkebunan sawit. "Produk pertanian yang semakin maju, selain pada sektor perkebunan sawit juga merambah ke sektor pangan. Ke depan harga pangan tidak murah, persoalan dunia kedepan, pasti pangan bisa memicu konflik. Untuk itulah setiap negara agar memperkuat pangannya.

Lebih lanjut Mentan menerangkan dukungan pemerintah terhadap petani juga sangat diperlukan. Salah satunya adalah dalam bentuk subsidi pupuk yang pada tahun 2013 mencapai Rp18 triliun. Pemberian subsidi juga dalam bentuk perbenihan. "Benih adalah awal mula tanaman yang akan tumbuh dan berproduksi. Kita mensubsidi benih sekitar Rp1 triliun dan Pupuk mencapai Rp18 triliun," ujar Mentan.

Pengembangan Teknologi Tepat Guna Sebagai Titik Ungkit Pembangunan Pertanian

"Kementerian Pertanian menempatkan pengembangan teknologi tepat guna sebagai salah satu titik unkit dalam pembangunan pertanian Indonesia. Begitu pentingnya bagi pertanian Indonesia karena sebagai salah satu peluang bagi penciptaan lapangan kerja baru yang masif. Dengan berbagai pengembangan teknologi maka kehandalan sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang perlu mendapat penanganan khusus"

Kementerian Pertanian menyadari teknologi spesifik lokasi atau teknologi tepat guna begitu penting bagi pertanian Indonesia karena merupakan salah satu peluang bagi penciptaan lapangan kerja baru yang masif adalah melalui pengembangan teknologi tepat guna yang berbasis pada sumberdaya pertanian yang dimiliki. "Bertitik tolak dari kenyataan di atas, maka dan sejak awal kami di Kementerian Pertanian telah menempatkan pengembangan teknologi tepat guna sebagai salah satu titik unkit dalam pembangunan pertanian Indonesia, dengan tujuan akhir Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani" kata Menteri Pertanian dalam sambutannya pada acara Pekan Teknik Pertanian Nasional ke V di Lampung, (11/12).

Terkait dengan isu teknologi tepat guna yang berhubungan erat dengan upaya peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, Mentan memaparkan bahwa pihaknya selama tahun 2010-2014 telah mencanangkan target dengan meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan dari 20% di tahun 2010 menjadi 50% pada tahun 2014, serta meningkatnya surplus neraca perdagangan dari US\$ 24,3 milyar di tahun 2010 menjadi US\$ 54,5 milyar pada tahun 2014. "Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada dua hal yakni peningkatan kualitas dan jumlah



olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas produk pertanian (segar dan olahan) diukur dan peningkatan jumlah produk pertanian yang mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (SNI, Organik, Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Manufacturing Practices)" papar Mentan.

Mentan menegaskan pada akhir 2014 semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olah karet (bokar) sudah harus tersertifikasi dengan pemberlakuan sertifikasi wajib. Peningkatan jumlah olahan diukur dan rasio produk segar olahan. "Saat ini sekitar 80 % produk pertanian diperdagangkan

dalam bentuk segar sedangkan 20 % dalam bentuk olahan sehingga nilai tambahnya sangat kecil. Pada akhir 2014 ditargetkan bahwa 50% produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk olahan” terang Mentan.

Menurut Mentan implementasi pengembangan teknologi tepat guna selama tiga tahun terakhir dilaksanakan secara terintegrasi dari sejak hulu sampai ke hilir, dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas, teknologi dan pendampingan, SDM yang kompeten, pasar dan kelembagaan serta kebijakan yang mendukung. “Upaya perbaikan kualitas produk pertanian serta menekan angka kehilangan hasil dilakukan secara simultan dengan berbagai pendekatan, yang utama adalah pemberdayaan petani melalui kelompok dengan didukung bantuan berbagai peralatan pendukung. Upaya ini secara nyata telah mampu menekan angka kehilangan hasil serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan petani” ujar Mentan

Mentan menjelaskan kendala utama dalam pengembangan teknologi tepat guna di Indonesia, adalah pengembangan yang dilakukan belum terintegrasi dalam suatu upaya bersama yang saling mendukung. Pendekatan pembangunan yang lebih berat ke arah pembangunan sektoral, menyebabkan berbagai upaya yang telah dikembangkan Kementerian Pertanian tidak tuntas. Kementerian Pertanian perannya hanya sekitar 20 % untuk ketuntasan suatu kegiatan, sekitar 80 % sangat tergantung dan dukungan sektor lain.

“Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian harus saling mengait dan mendukung dalam satu alur agribisnis. Teknologi tepat guna harus dipandang sebagai suatu sistem yang saling mengait, mulai dan arus bahan baku pertanian sampai ke prosesing dan kemudian ke konsumen. Keterkaitan ini perlu didukung oleh kelembagaan, dalam bentuk tata aturan dan organisasi yang beroperasi dan berinteraksi dalam mata rantai agribisnis. Keterkaitan ini mampu memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian yang dihasilkan petani” jelas Mentan.

Lebih Lanjut Mentan menjelaskan bahwa pengembangan teknologi tepat guna harus dapat menyiasati tiga karakteristik utama dan produk pertanian, yaitu bersifat musiman (*seasonality*), mudah rusak (*perishability*), dan beragam (*variability*) kualitasnya. “Komponen biaya bahan baku umumnya merupakan komponen terbesar dalam teknologi tepat guna, sehingga pengadaan bahan baku sangat menentukan keberlanjutan. Selain itu pengembangan teknologi tepat guna harus dapat memperpanjang kesegaran produk yang dihasilkan petani, dan dapat dikembangkan pada bahan baku yang beragam kualitasnya” jelas Mentan

Mentan juga menambahkan sejalan dengan berbagai pengembangan teknologi, kehandalan sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang perlu mendapat penanganan khusus. Terkait dengan sumber daya manusia tersebut, pengembangannya harus selaras dengan semangat industrialisasi pedesaan atau pertanian industrialis.

Mentan: “Tuntutan Kinerja Harus Berprestasi dan Excellent”

“Penetrasi pasar yang ternyata tidak hanya ditentukan oleh daya saing produk saja, pengembangan sumberdaya manusia melalui program kediklatan yang hanya pada diklat pegawai atau petugas saja, pengembangan teknologi dan alih teknologi yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perubahan iklim dan lingkungan merupakan tantangan pertanian dan produksi pangan ke depan yang harus diperhatikan adalah sebagian masalah yang menjadi tugas bagi 4 pejabat Eselon I yang baru dilantik”

Berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam bidang tugas Pejabat Kementerian Pertanian ke depan sangatlah besar dan mendesak untuk segera diselesaikan. Oleh sebab itu, Menteri Pertanian meminta pejabat yang baru saja dilantik dapat segera melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di lingkup Kementerian Pertanian, maupun dengan unit kerja terkait lainnya di luar Kementerian Pertanian. “Tuntutan kinerja saat ini tidak bisa hanya dengan menjalankan tugas jabatan melalui cara kerja biasa (*business as usual*) tetapi harus berprestasi, dan excellent khususnya pada masa kerja kabinet Indonesia Bersatu II yang tinggal beberapa bulan saja” kata Menteri Pertanian, Suswono saat memberikan arahan kepada Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang baru dilantik di Kampus Kementan (16/12).

Mentan menjelaskan permasalahan yang ada diantaranya penetrasi pasar yang ternyata tidak hanya ditentukan oleh daya saing produk saja, tetapi yang lebih menentukan adalah daya saing pelakunya yaitu petani dan pelaku usaha, untuk itu Direktur Jenderal PPHP diminta agar segera menyusun program-program terobosan untuk mengembangkan usaha-usaha industri pengolahan dan akselerasi pemasaran, tidak hanya pasar domestik tetapi juga ekspor. “Program yang disusun tidak hanya partial seperti sekarang ini karena hanya bergantung pada DIPA, tetapi program harus skala yang lebih masif sehingga berdampak nyata secara nasional. Selenggarakan gerakan tersebut dengan melibatkan asosiasi atau pelaku usaha, pemerintah daerah, instansi terkait secara berkelanjutan. Upaya-upaya peningkatan kualitas panen, pasca panen dan menekan kehilangan

hasil harus tetap didorong seiring dengan pengembangan mekanisme Pertanian” ujar Mentan.

Masalah lainnya adalah pengembangan sumberdaya manusia melalui program kediklatan yang hanya pada diklat pegawai atau petugas saja, padahal seharusnya lebih bertumpu pada sumberdaya petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan proses alih teknologi melalui penyuluhan yang belum berjalan baik, bahkan di beberapa wilayah tidak berjalan sama sekali. “ Kepada Kepala Badan PSDMP agar memperjuangkan penambahan tenaga penyuluh terus ditindaklanjuti, namun demikian kita tidak harus berhenti menunggu tambahan tenaga penyuluh dan formasi CPNS. Upaya pengembangan penyuluh swadaya perlu lebih didorong melalui bentuk-bentuk insentif non-belanja tetap. Program kediklatan agar lebih diorientasikan pada diklat petani, dan disinergikan dengan institusi pendidikan dan pelatihan lain baik pemerintah mau pun lembaga swasta” kata Mentan.

Terkait masalah teknologi, Mentan meminta Staf Ahli Bidang Teknologi agar segera menyusun konsep pengembangan teknologi dan alih teknologi yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan reviu program pengembangan dan penelitian termasuk kelembagaan yang terkait pengembangan dan penyebaran teknologi. “Sesungguhnya kita bukan aktivis pembangunan dan penelitian sendiri, tetapi kita harus mampu menjadi dinamisator, fasilitator, koordinator instansi penelitian terkait dan lembaga riset swasta/ BUMN dan perguruan tinggi” pinta Mentan.

Mentan menuturkan perubahan iklim dan lingkungan merupakan tantangan pertanian dan produksi pangan ke depan harus diperhatikan. Agar pembangunan



lestari berkelanjutan maka perlu kajian perubahan iklim dan perkiraan dampaknya. Isu internasional tentang perkebunan sawit yang merusak hutan, mengganggu plasma nutfah dan orang hutan harus dapat kita tangkal dengan menunjukkan bukti-bukti ilmiah, karena isu lingkungan tersebut dapat merugikan industri sawit Indonesia. “Saudara Staf Ahli Bidang Lingkungan dapat memberikan masukan kebijakan berkaitan permasalahan tersebut. Sudah barang tentu masukan-saran kebijakan yang lain sesuai tugas pokok fungsinya juga saya harapkan. Saya sangat menunggu konsep pemikiran baru pembangunan Pertanian, bukan mengulang program masa lalu yang kurang berhasil kemudian mengganti dengan dengan nama lain yang seolah baru” tutur Mentan.

Mentan juga mengajak kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian, untuk memahami, menghayati, dan melaksanakan pernyataan Makna Bekerja (Meaning) yakni “Mengabdikan untuk Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani”, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar (Value) Kementerian Pertanian yaitu Komitmen, keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Disiplin (KKPID).

Pentingnya Membangun Jejaring Eksternal dan Internal Relations

“Pentingnya upaya membangun jejaring eksternal antara lain. media massa, anggota parlemen, pakar pertanian, petani/ LSM dan perwakilan publik tani, institusi terkait seperti Kemendag, Kemenkeu, Kemen PU, kemendagri, Bulog, WTO, APEC, IRRI, FAO, dan lainnya). Serta tidak kalah penting adalah membina ‘Internal Relations’ Isu tersebut tidak kalah penting, karena akan ikut membantu dalam hal kecepatan merespons isu”

Kementerian Pertanian dengan permasalahan dan isu yang sangat beragam dan berbagai sudut pandang yang berbeda. seperti isu ‘pemangku kepentingan’, isu produksi komoditas, isu SDM, isu petani sebagai produsen, isu dan sudut pandang pedagang, isu dan masyarakat sebagai konsumen menjadikan peran Humas Kementan di era keterbukaan informasi publik semakin penting dan strategis.

“Berbagai tantangan yang dihadapi Humas Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugasnya merupakan momentum yang baik untuk memperbaiki kualitas kinerja unit kerja terkait. Sungguh kompleks jika tidak dikelola dengan sistem pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkualitas dan proporsional untuk mengemas dan menyajikan informasi yang dibutuhkan publik, akurat,

menarik dan dapat dipertanggungjawabkan” kata Menteri Pertanian, Suswono saat membuka acara Sinkronisasi Kehumasan Kementerian Pertanian di Arion Swiss-Belhotel Kemang-Jakarta Selatan (18/12).

Dalam acara Sinkronisasi Kehumasan yang dihadiri oleh Sekjen Kementan, Tim Media sebagai working group kehumasan, para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta para pejabat struktural yang membidangi kehumasan di lingkup Kementerian Pertanian, **Mentan menyampaikan** harapan kepada seluruh Humas **Unit Kerja** Eselon I lingkup Kementan untuk bisa **mempersiapkan** langkah-langkah yang

Langkah berikutnya, bagaimana membuka relasi dengan pejabat Humas di masing-masing instansi tersebut” tegas Mentan.

Mentan memaparkan kinerja Eksternal Relations Humas akan terasa tumpul bila urusan Internal Relations Humas di Kementan sendiri kurang terpelihara dan terjaga. Sebab bagaimana mungkin langkah Humas bisa bergerak cepat bila urusan konfirmasi pemberitaan terhadap satu isu saja berjalan lambat, padahal ketika itu dibutuhkan kecepatan tinggi untuk merespons satu kasus untuk klarifikasi kepada Pejabat Satker tertentu.



“Disinilah, Humas harus membangun relasi yang cantik di internal lembaga. karena itulah Tim Media Kementerian Pertanian telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4227/Kpts/OT.160/4/2013 sebagai working group yang memiliki perspektif Kementan-Wide yang akan mengikis ego-ego sektoral untuk fokus pada kepentingan lembaga” papar Mentan

Lebih lanjut Mentan menerangkan bagaimana melakukan orkestrasi semua elemen dan coba dipelajari keterkaitan satu dengan yang lain. Ketika mencari benang merah inter-links tersebut akan ditemukan pula pola-pola yang akan menjadi mozaik dalam membangun *Grand Design Strategy Communications* Kementan.

kongkrit dalam membangun kehumasan Kementerian Pertanian yang mentargetkan sokongan publik (stakeholders) secara luas, melalui penetapan Target dan Goal yang jelas dan terukur.

“Data dan analisa diperlukan untuk meriset profil figur/ tokoh terkait sektor pertanian, baik yang sejalan atau bertentangan dengan kebijakan Kementan terkait isu tertentu dan isu-isu lainnya. Data analisa ini diperlukan untuk membantu memberikan keterkinian data juga untuk menggiring opini Bahan kajian ini yang menjadi rujukan Tim Humas dalam menentukan dan mengambil arah kebijakan Strategi Komunikasi” jelas Mentan.

Mentan menegaskan pentingnya upaya membangun jejaring eksternal antara lain media massa, anggota parlemen, pakar pertanian, petani/LSM dan perwakilan publik tani, institusi terkait seperti Kemendag, Kemenkeu, Kemen PU, kemendagri, Bulog, WTO, APEC, IRRI, FAO, dan lainnya). Serta tidak kalah penting adalah membina ‘Internal Relations’ Isu tersebut tidak kalah penting, karena akan ikut membantu dalam hal kecepatan merespons isu.

“Bukankah sering-sering yang terjadi komunikasi internal yang macet atau salah paham antar unit kerja di lembaga yang membuat respons atas satu isu jadi keteteran. Memetakan jejaring ini yang paling dinamis.

“Humas kementan bisa memprioritaskan fokus pada pengelolaan isu di media massa dan isu di internal. Dua item ini digarap serius terlebih dahulu sudah cukup membantu meredam pergerakan isu-isu negatif. Bagaimana mulai menggarap media massa selain paparan di atas Tim Media Relations Humas harus diajak bekerja dengan lebih dan yang ada sekarang (*above the limit*). Lakukan pertemuan harian, mingguan, bulanan yang membahas evaluasi kinerja Humas dari sisi pemberitaan (memenangkan isu). Sedikit pasang target ditengah keterbatasan **resources** SDM dan mungkin dana serta mungkin **kapasitas** otoritas Humas yang terbatas kewenangannya” terang Mentan

Mentan juga menegaskan pentingnya konsentrasi untuk mencari langkah- langkah terobosan guna mencairkan relasi di internal kementan khususnya merobohkan ego sektoral. Mungkin dengan mengajak semua pihak di internal melihat kepentingan lembaga sebagai prioritas tinggi yakni Kementan-Wide, untuk melihat mana kepentingan utama lembaga yang berada diatas kepentingan ego satker-satker. Cairnya suasana relasi-komunikasi internal akan sangat membantu kerja Humas dalam merespons pemberitaan yang terkadang berada di jalur cepat -bebas hambatan pula.



BIRO UMUM DAN HUMAS
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM, No. 3 Jakarta Selatan
Telp./Fax (021) 780 4457 (ext.2316)